

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024

Sartin Adjira, Rio Monoarfa, Muzdalifah

Universitas Negeri Gorontalo

sartinadjira@gmail.com, rio@ung.ac.id, muzdalifah@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Gorontalo Regency Government during the 2020–2024 period. The research employed a descriptive quantitative method with a non-statistical approach. The data were obtained from local government financial reports and analyzed using effectiveness ratios, efficiency ratios, independence ratios, harmony ratios, growth trend analysis, and predictive analysis. The results indicate that the regional financial performance, as measured by the effectiveness ratio, remains ineffective because the realization of Local Own-Source Revenue (PAD) has not optimally achieved the established targets. The efficiency ratio demonstrates an inefficient condition due to the relatively high expenditure realization compared to revenue realization. The independence ratio falls within the instructive category, indicating a high dependence on transfers from the central government. The harmony ratio reveals that regional expenditures are still dominated by operational spending rather than capital expenditure. Furthermore, growth analysis shows fluctuating trends in regional revenues and expenditures, while predictive analysis suggests positive prospects for future financial performance through the optimization of local revenue sources, expenditure control, and improvements in regional financial management. The findings are expected to serve as an evaluation tool for local governments in enhancing fiscal effectiveness, efficiency, and financial independence in a sustainable manner.

Keywords: *regional financial performance, effectiveness ratio, efficiency ratio, financial independence ratio, Gorontalo Regency.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo periode 2020–2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan non-statistik. Data yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dianalisis melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian, analisis pertumbuhan (trend), dan analisis prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas masih tergolong tidak efektif karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mencapai target yang ditetapkan secara optimal. Rasio efisiensi menunjukkan kondisi yang belum efisien karena besarnya realisasi belanja dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Rasio kemandirian berada pada kategori instruktif yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio keserasian memperlihatkan bahwa alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Analisis pertumbuhan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif pada komponen pendapatan dan belanja daerah, sedangkan analisis prediksi mengindikasikan adanya peluang peningkatan kinerja keuangan di masa mendatang melalui optimalisasi PAD, pengendalian belanja, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, Kabupaten Gorontalo.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan daerah. Selain sumber daya manusia yang dapat dipercaya, pengelolaan keuangan daerah juga memerlukan sumber daya keuangan yang memadai (Verawati, Padang, and Fauziah 2023). Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas kinerja dengan memberikan informasi yang tepat tentang hasil program yang akan dilaksanakan. Menurut Padmadiani dalam Ointu dkk., (2025). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk keuangan daerah yang hasil pengelolaannya tercermin dalam laporan keuangan (Nasir dkk., 2025). Cara pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya memiliki dampak signifikan pada masa depannya karena menentukan apakah daerah tersebut dapat berkembang atau tidak (Verawati, Padang, and Fauziah, 2023). Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilakukan dengan mengacu pada paradigma desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmadani & Rudini, 2023).

Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri agar pengelolaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui otonomi daerah ini diharapkan akan menciptakan kemandirian daerah, sehingga mempercepat dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, serta terciptanya keberhasilan pembangunan di daerah (Melmambessy, 2022).

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada tahun 2020 dunia mengalami bencana pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Penyebaran pandemi *Coronavirus Disease* 2019 memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena menurunnya penerimaan negara dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara termasuk bidang perpajakan

dan sektor keuangan yang harus segera dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional yang difokuskan pada pemulihan dunia usaha yang terdampak (Ali dkk., 2024). Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hal ini terlihat dalam kebijakan publik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Sehingga, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 agar melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Onibala dkk., (2021) menemukan bahwa pandemi menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun dampaknya tidak signifikan secara statistik.

Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo merupakan daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Kabupaten Gorontalo juga merupakan salah satu daerah yang juga terdampak adanya pandemi Covid-19. Berikut ini disajikan laporan realisasi anggaran APBD pemerintah Kabupaten periode 2020-2024.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo 2020-2024

	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
Pendapatan Daerah	2020	1.488.426.104.548	1.408.590.213.911	94,64%
	2021	1.410.927.542.457	1.351.193.921.844	95,77%
	2022	1.385.654.283.702	1.255.100.044.662	90,58%
	2023	1.473.409.178.386	1.352.281.735.989	91,78%
	2024	1.517.617.963.721	1.471.893.733.272	96,99%
Belanja Daerah	2020	1.515.696.646.369	1.392.206.507.241	91,85%
	2021	1.811.819.904.596	1.541.309.144.839	85,07%
	2022	1.503.882.283.702	1.475.435.901.270	98,10%
	2023	1.485.641.523.747	1.343.406.170.962	90,42%
	2024	1.536.147.818.867	1.411.586.291.372	91,89%

Sumber: (bkad.gorontalo.kab.go.id, 2026)

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dari sisi pendapatan dan sisi belanja bersifat fluktuasi pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020 presentase pencapaian mencapai 94,64% yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terealisasi dengan baik, meskipun masih terdapat selisih yang

tidak terserap sepenuhnya. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai anggaran menjadi Rp1.410.927.542.457, namun realisasi mencapai Rp1.351.193.921.844 dengan persentase 95,77% yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cukup optimal dalam merealisasikan target pendapatan meskipun masih berada pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 baik anggaran maupun realisasi mengalami penurunan, dengan anggaran sebesar Rp1.385.654.283.702 dan realisasi Rp1.255.100.044.662. Tingkat pencapaian juga turun menjadi 90,58%, yang merupakan persentase terendah selama lima tahun. Pada tahun 2023, anggaran meningkat signifikan menjadi Rp1.473.409.178.386 dengan realisasi Rp1.352.281.735.989. Persentase pencapaian naik kembali menjadi 91,78%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja keuangan meskipun belum mencapai tingkat optimal seperti tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2024 anggaran kembali meningkat dengan persentase sebesar 96,99%. Sementara itu, dari sisi belanja daerah, realisasi anggaran menunjukkan tren yang relatif baik dengan persentase di atas 85% setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi belanja mencapai 91,85%, kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 85,07%. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi anggaran selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan pemerintah daerah tidak terlaksana secara maksimal. Selanjutnya, pada tahun 2022 realisasi belanja meningkat menjadi 98,10%, yang menunjukkan tingginya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah. Tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 90,42% dan 91,89% yang menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 10% anggaran belanja yang tidak terealisasi atau belum terserap pada tahun anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat program, kegiatan, atau pengeluaran daerah yang tidak terlaksana secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Oleh sebab itu, diperlukan suatu analisis kinerja keuangan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan serta meningkatkan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

Menurut Febrina Astria Verasvera dalam jurnal (Waruwu dkk. 2024) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan diantaranya analisis rasio keuangan, analisis, analisis pertumbuhan (*Trend*) dan analisis prediksi. Menurut Kashmir (dalam Nurwana dkk. 2023) analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Salah satu alat analisis laporan keuangan yang dapat digunakan yaitu menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian dan rasio keserasian. Rasio efektivitas merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah disetujui atau yang sudah dianggarkan (Susanti, 2023). Rasio efisiensi adalah Gambaran mengenai perbandingan biaya (output) yang dihasilkan dengan pendapatn (input)

yang digunakan untuk mengetahui keefisienan dari kinerja keuangan daerah (Bunganingtyas dkk., 2023). Menurut Sutanto dalam jurnal (Soraya, Nasrullah, and Ayu 2023) Rasio kemandirian menunjukkan Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Rasio keserasian merupakan kemampuan pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi anggaran, terutama dalam mengalokasikan dan untuk belanja modal, rutin dan pembangunan (Ravelia dkk., 2025). Analisis pertumbuhan atau *trend* dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui perkembangan kinerja. Analisis Prediksi merupakan gambaran mengenai arah perkembangan kinerja keuangan di masa depan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan kondisi di masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan ini amat penting sebab bisa membantu mengidentifikasi masalah dan memberikan saran tentang cara meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang juga dapat menetapkan target kinerja keuangan yang ditentukan dan menilai keberhasilan kinerja keuangan (Verawati dkk., 2023). Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Rohmad dkk., 2023) menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup efisien. Penelitian yang dilakukan Purwanti & Noviyanti (2021) menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Tidak Efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah dan dalam kategori pola hubungan Konsultatif. Sementara penelitian yang dilakukan Asiah dkk. (2023) menunjukkan bahwa Hasil Penelitian ini menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya tergolong dalam pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup efektif, Efisiensi PAD tergolong tidak efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan non-statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan daerah tanpa menggunakan uji statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Keuangan

Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sama-sama menunjukkan kondisi yang belum mencapai kategori efektif. Namun demikian, rasio efektivitas LO cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih baik pada akhir periode penelitian dibandingkan dengan periode awal. Sementara itu, rasio efektivitas LRA juga mengalami peningkatan pada akhir periode, tetapi masih menunjukkan fluktuasi yang cukup besar selama masa pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses realisasinya. Perbedaan capaian efektivitas antara LRA dan LO dapat disebabkan oleh karakteristik pengakuan pendapatan yang berbeda. LRA berfokus pada realisasi penerimaan yang benar-benar diterima dalam periode anggaran, sedangkan LO mencerminkan pendapatan yang menjadi hak organisasi pada periode berjalan. Oleh karena itu, efektivitas pada LO dapat menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik karena mencerminkan potensi pendapatan yang telah diakui meskipun belum seluruhnya direalisasikan dalam bentuk penerimaan kas.

Berdasarkan *Agency Theory*, hasil tersebut menunjukkan pentingnya hubungan antara pihak pengelola (agent) dan pihak yang memberikan amanah atau pemangku kepentingan (principal). Pengelola memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa target pendapatan dapat dicapai secara optimal melalui perencanaan yang baik, pengawasan yang memadai, serta penyampaian informasi yang transparan. Ketika koordinasi dan pengendalian berjalan secara efektif, maka peluang untuk meningkatkan efektivitas pendapatan baik pada LRA maupun LO akan semakin besar sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih optimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Digdowiseiso & Alfian, (2023) hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di tingkat rendah (dibawah 100%) atau tidak efektif. Berbeda dengan yang dilakukan Arusani dkk., (2022) dengan hasil penelitian bahwa Rasio efektifitas PAD termasuk kategori sangat efektif.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis, rasio efisiensi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Laporan Operasional (LO) menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu belum mencapai kategori efisien berdasarkan kriteria yang digunakan. Kedua rasio tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran atau beban yang dikeluarkan masih relatif besar dibandingkan dengan kemampuan penerimaan yang diperoleh. Meskipun demikian, masing-masing laporan memiliki karakteristik pengukuran yang berbeda sehingga menghasilkan gambaran yang berbeda pula terhadap kinerja keuangan organisasi. Pada LRA, pengukuran efisiensi lebih menekankan pada realisasi belanja dibandingkan dengan realisasi pendapatan dalam satu periode anggaran. Sementara itu, pada LO, efisiensi diukur melalui hubungan antara beban

operasional dan pendapatan operasional yang mencerminkan aktivitas ekonomi selama periode berjalan. Oleh karena itu, rasio efisiensi LO dapat memberikan informasi yang lebih luas mengenai kemampuan organisasi dalam mengendalikan beban operasional untuk mendukung pencapaian pendapatan operasional.

Berdasarkan *Agency Theory* pemerintah daerah sebagai agen dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara efisien agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sebagai prinsipal. Tingginya rasio efisiensi dapat dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang memerlukan alokasi anggaran cukup besar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amal & Wibowo, (2022) hasil penelitian menunjukkan rasio efisiensi berkriteria tidak efisien. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Francisco dkk., (2023) hasil penelitian menunjukkan rasio efisiensi berada dalam kategori efisien.

Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian Kabupaten Gorontalo tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih berada pada kategori instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan pinjaman daerah. Walaupun demikian, peningkatan rasio kemandirian pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara bertahap. Dalam *Stewardship Theory* memandang bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjalankan amanah masyarakat melalui penguatan kapasitas keuangan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Adanya peningkatan rasio kemandirian pada akhir periode penelitian menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kemampuan fiskal daerah secara berkelanjutan. Sementara dalam *Agency Theory*, pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Rendahnya tingkat kemandirian daerah tidak sepenuhnya menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah dan keterbatasan potensi pendapatan yang dimiliki.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Digdowiseiso & Alfian, (2023) hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian seluruhnya Instruktif, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fisfia dkk., (2026) hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian berada dalam kategori delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Keserasian

Berdasarkan hasil penelitian rasio keserasian belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2020–2024 bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk mendukung kebutuhan rutin pemerintahan dan pelayanan publik, sedangkan proporsi belanja modal yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan aset daerah masih relatif lebih rendah. Secara rata-rata, rasio keserasian belanja masih tergolong belum serasi karena ketidakseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Berdasarkan *Stewardship Theory*, pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang memiliki komitmen untuk bekerja demi kepentingan organisasi dan masyarakat secara bersama-sama. Tingginya alokasi belanja operasional dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. *stewardship theory* juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran sehingga proporsi belanja modal dapat lebih optimal dan mampu mendukung pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dalam *Agency Theory* Dominasi belanja operasional menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, namun di sisi lain diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih seimbang agar pembangunan daerah melalui belanja modal dapat lebih ditingkatkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purwanti & Noviyanti, (2021) Dari hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki diutamakan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arlina & Pujiyanto, (2023) Rasio Keserasian Keuangan Daerah dalam kategori serasi karena Belanja Operasi dan Belanja Modal seimbang.

Analisis Pertumbuhan (Trend)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) memiliki pola yang relatif serupa, yaitu mengalami penurunan pada awal periode penelitian dan kemudian berangsur membaik pada tahun-tahun berikutnya. Kedua laporan menunjukkan adanya peningkatan kinerja pendapatan pada akhir periode penelitian yang mengindikasikan bahwa organisasi mampu memperbaiki kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Sedangkan pertumbuhan belanja pada LRA dan LO sama-sama menunjukkan pola fluktuatif selama periode penelitian. Kedua laporan menggambarkan adanya perubahan kebutuhan pengeluaran yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan prioritas program pada masing-masing periode. Fluktuasi tersebut merupakan hal

yang wajar karena organisasi perlu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan, kegiatan operasional, serta kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan *Agency Theory*, pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah agar mampu mendukung kebutuhan masyarakat sebagai prinsipal. Fluktuasi pertumbuhan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD, serta penyesuaian kebijakan anggaran daerah. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan yang tetap positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan perkembangan fiskal daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfiani dkk., (2023) rasio pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran dengan rata-rata yang positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Rahmawati & Warsitasari, 2023) pada rasio pertumbuhan PAD dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif.

Analisis Prediksi

Berdasarkan hasil prediksi, baik pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Laporan Operasional (LO), menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu adanya peningkatan pada pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang. Prediksi pendapatan pada kedua laporan mengindikasikan bahwa organisasi memiliki potensi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan sumber penerimaan. Di sisi lain, prediksi belanja pada LRA dan beban pada LO juga menunjukkan tren peningkatan sebagai konsekuensi dari kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Hasil tersebut menggambarkan adanya pertumbuhan aktivitas organisasi yang diproyeksikan berlangsung secara berkelanjutan. Perbedaan antara LRA dan LO terletak pada dasar pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan. LRA lebih berfokus pada realisasi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan anggaran, sedangkan LO menggambarkan aktivitas operasional yang mencerminkan hak dan kewajiban organisasi selama periode berjalan. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, hasil prediksi keduanya menunjukkan arah yang sejalan, yaitu adanya peningkatan kapasitas keuangan sekaligus meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional dan program organisasi.

Berdasarkan *Agency Theory*, pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan keuangan yang realistis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Prediksi peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan berdasarkan asio efektivitas secara rata-rata masih tergolong tidak efektif karena realisasi PAD belum sepenuhnya mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Kinerja keuangan berdasarkan Rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih berada pada kategori tidak efisien. Hal ini terlihat dari besarnya realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada setiap tahun penelitian.
3. Kinerja keuangan berdasarkan Rasio kemandirian keuangan daerah selama periode penelitian berada dalam kategori instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui PAD masih relatif terbatas sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.
4. Kinerja keuangan berdasarkan Rasio keserasian belanja daerah menunjukkan bahwa proporsi belanja operasional lebih besar dibandingkan belanja modal. Secara rata-rata, kondisi tersebut menggambarkan bahwa keserasian belanja daerah masih belum optimal karena sebagian besar anggaran masih digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan rutin.
5. Kinerja keuangan berdasarkan pertumbuhan keuangan daerah menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif pada komponen PAD, pendapatan, dan belanja daerah. Fluktuasi tersebut mencerminkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan anggaran, dan dinamika aktivitas masyarakat.
6. Kinerja keuangan berdasarkan hasil prediksi keuangan daerah diperkirakan masih memiliki peluang untuk berkembang secara positif apabila optimalisasi PAD, pengendalian belanja, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., Noholo, S., & Wuryandini, A. R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UKM Kota Gorontalo Dan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating. *6*(1), 132–142.
- Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., & Fitriyani. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. *9*(01), 38–53.
- Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2023). Financial Performance Analysis of Local Government in Managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Bogor Regency. *Journal Of Business Innovation and Accounting Research*, *2*(3), 140–150.
- Ali, M. F., Yusuf, N., & Taruh, V. (2024). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo antara Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 Periode 2017-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(10), 6697–6713. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3059>
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan*

Negara, 4(1), 83–93.

- Arlina, M. T., & Pujiyanto. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Kota Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19. *1*(1), 147–160.
- Arusani, Kusuma, U. W., & Harimau, L. I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. *01*(02), 123–136.
- Asiah, N., Addiarrahman, & Muthmainnah. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 15–21.
- BAKD Kabupaten Gorontalo. (2026). *Transparansi & Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Bkad.GorontaloKab.Go.Id. <https://bkad.gorontaloKab.go.id/transparansi>
- Bunganingtyas, A., Natalian, E. A., & Manurung, H. (2023). Penilaian Kinerja APBDES Desa Purwodadi Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 15–27.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory Of Management. *Academy Of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Digdowiseiso, K., & Alfian, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 247–258.
- Fisfia, D. L., Ijayanti, D. A., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analisis Keuangan Daerah Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBD Di Kabupaten Sidoarjo. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 213–222.
- Francisco, J., Alexandre, X., & Taufik, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2021. *1*(4).
- Indonesia, P. P. P. U.-U. R. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman.
- Instruksi Presiden RI. (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *022698*, 22698–22701.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360.
- Kusumawardani, A. F., & Asrihapsari, A. (2023). Financial Performance Analysis of Local Government: A Case Study on Karanganyar Regency. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 66–80. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2023.7.2.2013>
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (keempat). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 10–15.
- Mendrofa, R., Wahyuni, A., Isnaini, P., & Aliah, N. (2024). Menilai Kinerja Keuangan Dengan Analisis Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 35–43. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art4>
- Monoarfa, R., Ahmad, S. H., & Hiola, Y. (2025). Peningkatan Kapasitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUMDes dan Koperasi Desa dalam Mendukung Transparansi Dana Desa di Desa Isimu Utara. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 5(1), 22–29.
- Nasir, N., Monoarfa, R., & Husain, S. P. (2025). Pengaruh Teknologi Informasi dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 411–425.
- Nurwana, A., Purwanto, A., & Akbar. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *PRECISE: Jurnal Of Economic*, 2(1), 9–17.
- Ointu, S. R., Pakaya, L., & Muzdalifah. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jambura Accounting Review*, 6(2), 733–746.
- Oktaviani, E., & Marini, Y. (2023). Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 97–105. <https://doi.org/10.31289/jbi.v2i2.2964>
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12.
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021. *8(2)*, 133–143.
- Rahmawati, L., & Warsitasari, W. D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021. *10(1)*, 339–354.
- Ravelia, V., Devy, T., Rahmi, & Nurani, K. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Pada Pemerintahan Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(4), 261–276.
- Rohmad, M., Isma, A., & Ramli, F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 17–

35.

- Setiawan, D., Iqbal, M., & Diani, S. (2023). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Desa. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(2), 86–97.
- Soleha, A. R. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Kimia Farma , Tbk. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 250–260.
- Soraya, Z., Nasrullah, & Ayu, N. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Tsarwah*, 6(2), 27–36.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, S. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1307>
- Verawati, Padang, J., & Fauziah. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, Vol 3 No 3, 105–118.
- Waruwu, N. R. S., Waruru, S., Bate'e, M. M., Telaumbanua, A., & Halawa, F. (2024). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa Binika Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. 17(1), 173–187.
- Wawolangi, S. G. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2025). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.58784/rapi.270>